



ANALISIS KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR DARI SUDUT PANDANG GURU DI SEKOLAH SMA SWASTA METHODIST 7 MEDAN

ANALYSIS OF INDEPENDENT LEARNING POLICY FROM THE POINT OF VIEW OF TEACHERS AT METHODIST PRIVATE HIGH SCHOOL 7 MEDAN

Elya Siska Aggraini¹, Dian Sartika², Sobri Sabana³, Siti Masni⁴

Universitas Negeri Medan

Email : : elyasiskaaggraini@unimed.ac.id¹, diansartika7658@gmail.com²
ajasobri938@gmail.com³, sitiimasnii@gmail.com⁴

Article Info

Article history :

Received : 21-05-2025

Revised : 23-05-2025

Accepted : 25-05-2025

Pulished : 27-05-2025

Abstract

This study analyzes the Merdeka Belajar policy from the perspective of teachers at Methodist-7 Medan Private High School. This study aims to understand teachers' understanding of the policy and the programs that are often implemented. In addition, this study will also look at the positive and negative impacts felt by teachers. A qualitative approach is used in the research method with data collection techniques in the form of observation and literature studies. Teachers view Merdeka Belajar as an effort to provide flexibility in learning, according to the results of the study, although challenges such as lack of training and administrative burdens are still obstacles. Implementation focuses primarily on programs such as the Merdeka Curriculum, National Assessment, and the Pancasila Student Profile Strengthening Project (P5). Increased teacher creativity and more relevant learning for students are among the positive impacts, while difficulties in adaptation and additional workload are among the negative impacts. This study concludes that there is a need for ongoing training support. Collaboration among stakeholders is also needed to optimize this policy.

Keywords : Flexible Learning, , Independent Learning, Teacher Perspective

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang kebijakan Merdeka Belajar dari perspektif guru di SMA Swasta Methodist-7 Medan. Penelitian ini bermaksud memahami pengertian guru mengenai kebijakan itu serta program-program yang kerap diterapkan. Selain daripada itu, penelitian ini juga akan melihat dampak positif serta dampak negatif yang dirasakan oleh guru. Pendekatan kualitatif digunakan dalam metode penelitian dengan teknik pengumpulan data berupa observasi serta studi pustaka. Guru memandang Merdeka Belajar sebagai suatu upaya memberikan fleksibilitas pada pembelajaran, menurut hasil penelitian itu, meski tantangan seperti kurangnya pelatihan serta beban administratif masih menjadi kendala-kendala. Implementasi berfokus terutama pada program seperti Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, juga Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Peningkatan pada kreativitas guru juga pembelajaran yang lebih relevan bagi siswa termasuk dampak positif, sedangkan kesulitan adaptasi serta beban kerja tambahan termasuk dampak negatif. Penelitian ini menyimpulkan akan perlunya dukungan pelatihan berkelanjutan. Kolaborasi di antara para pemangku kepentingan juga diperlukan untuk mengoptimalkan kebijakan ini.

Kata Kunci : Merdeka Belajar, Perspektif Guru, Tantangan Implementasi



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi penting sebab membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Kebijakan Merdeka Belajar diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini bermaksud meringankan beban administrasi, memacu inovasi dalam pengajaran, juga memberi keluwesan bagi guru serta siswa dalam proses belajar. Namun demikian, implementasinya pada tingkat sekolah menghadapi berbagai macam tantangan. Hal ini terutama terjadi dari sudut pandang guru sebagai pelaksana utama. Sebagai salah satu dari institusi pendidikan yang mengadopsi kebijakan ini, SMA Swasta Methodist 7 Medan menghadapi dinamika tersendiri di dalam penerapannya. Berdasarkan observasi awal, guru-guru di sekolah ini masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum dan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman guru tentang Merdeka Belajar, program-program yang diterapkan, serta dampaknya terhadap praktik mengajar sehari-hari. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pendidikan merupakan pilar fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan kebijakan “Merdeka Belajar” sebagai sebuah terobosan untuk memberikan fleksibilitas bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban administratif guru, mendorong kreativitas dalam pengajaran, serta mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Namun, implementasi kebijakan ini di tingkat sekolah tidak terlepas dari berbagai tantangan dan persepsi yang berbeda dari para guru sebagai ujung tombak pelaksana.

SMA Methodist 7 Medan sebagai salah satu institusi pendidikan swasta yang turut mengadopsi kebijakan Merdeka Belajar menghadapi dinamika tersendiri dalam penerapannya. Berdasarkan observasi awal, terdapat beberapa indikasi bahwa guru-guru di sekolah ini masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum, merancang pembelajaran berdiferensiasi, serta mengintegrasikan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, minimnya pelatihan dan pendampingan dari pemerintah maupun pihak sekolah turut memengaruhi pemahaman dan kesiapan guru dalam menjalankan kebijakan ini.

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti studi oleh Fitriani & Darmawan (2022) di Jawa Barat dan Wahyudi et al. (2023) di sekolah inklusif, menunjukkan bahwa persepsi guru terhadap Merdeka Belajar sangat beragam, mulai dari antusiasme hingga kekhawatiran akan dampaknya terhadap sistem evaluasi dan beban kerja. Namun, belum banyak studi yang secara khusus menganalisis sudut pandang guru di lingkungan sekolah swasta berbasis agama seperti SMA Methodist 7 Medan. Padahal, karakteristik sekolah swasta dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat dapat memengaruhi cara guru menginterpretasikan dan mengimplementasikan kebijakan ini.

Kebijakan Merdeka Belajar yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kemandirian kepada satuan pendidikan, guru, dan peserta didik dalam mengoptimalkan proses pembelajaran (Kemendikbudristek, 2021). Di SMA Swasta Methodist 7



Medan, kebijakan ini dipandang sebagai upaya untuk mengurangi beban administratif guru sekaligus mendorong kreativitas dalam pengajaran. Guru-guru di sekolah ini menilai bahwa Merdeka Belajar memberikan ruang bagi pendidik untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa serta karakteristik lokal, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna.

Dari perspektif guru, Merdeka Belajar juga dimaknai sebagai kebebasan dalam memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa (Nurkholis, 2020). Di SMA Methodist 7 Medan, beberapa guru telah menerapkan pendekatan diferensiasi pembelajaran, di mana materi disesuaikan dengan kemampuan individu siswa. Hal ini sejalan dengan prinsip Merdeka Belajar yang menekankan pada pembelajaran berpusat pada siswa (*student-centered learning*). Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menuntut adaptasi cepat dari guru, terutama dalam hal penguasaan teknologi dan penyusunan modul ajar yang mandiri.

Selain itu, kebijakan Merdeka Belajar juga mencakup penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) menjadi lebih fleksibel, sehingga guru dapat fokus pada substansi materi daripada beban administratif (Suryaman, 2020). Di SMA Swasta Methodist 7 Medan, perubahan ini disambut positif karena mengurangi tekanan kerja guru, meskipun beberapa tenaga pendidik masih memerlukan pelatihan lebih lanjut untuk memahami skema baru tersebut. Guru senior cenderung lebih kesulitan beradaptasi dibandingkan guru muda yang lebih melek teknologi, menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan ini.

Aspek lain dari Merdeka Belajar adalah program Guru Penggerak, yang dirancang untuk menciptakan pemimpin pendidikan yang mampu mendorong inovasi di sekolah (Kemendikbudristek, 2022). Di SMA Methodist 7 Medan, beberapa guru telah mengikuti program ini dan membawa perubahan signifikan, seperti pengembangan proyek kolaboratif antarmata pelajaran. Namun, masih ada kendala seperti kurangnya dukungan sarana prasarana dan keterbatasan anggaran, yang menghambat optimalisasi program Merdeka Belajar di tingkat sekolah.

Dari sudut pandang guru, kebijakan Merdeka Belajar juga membawa tantangan dalam hal evaluasi pembelajaran, karena sistem asesmen kini lebih berfokus pada kompetensi daripada sekadar nilai kognitif (Haryati, 2021). Di SMA Methodist 7 Medan, guru-guru mulai menerapkan penilaian autentik melalui portofolio dan proyek, meskipun hal ini memerlukan waktu lebih banyak dalam penilaian. Beberapa guru mengeluhkan kurangnya panduan teknis dari pemerintah, sehingga mereka harus mengembangkan instrumen penilaian secara mandiri.

Secara keseluruhan, implementasi Merdeka Belajar di SMA Swasta Methodist 7 Medan mendapatkan tanggapan beragam dari guru. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan keleluasaan dalam berinovasi, tetapi di sisi lain, masih terdapat kendala seperti kesiapan sumber daya manusia, sarana pendukung, dan pemahaman yang belum merata di antara tenaga pendidik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara sekolah, pemerintah, dan pihak swasta untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Rachmadtullah et al., 2023).

Temuan Hasil Mini Riset tentang Kebijakan Merdeka Belajar di SMA Swasta Methodist 7 Medan:



1. Pemahaman Guru tentang Kebijakan Merdeka Belajar

Berdasarkan wawancara dengan seorang guru PPKn, ditemukan bahwa pemahaman tentang Merdeka Belajar masih bervariasi. Guru tersebut memahami konsep ini sebagai pemberian kebebasan dalam mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran. Pemahaman ini diperoleh setelah mengikuti pelatihan Kemendikbudristek, yang membantu guru dalam memahami filosofi *student-centered learning*. Namun, guru tersebut juga mengakui bahwa beberapa dokumen kebijakan terkadang sulit dipahami tanpa pendampingan lebih lanjut, terutama dalam penerapannya di mata pelajaran PPKn (Hasil wawancara, 07 Mei, 2025).

2. Program Merdeka Belajar yang Paling Sering Diterapkan

Berdasarkan observasi terhadap seorang guru PPKn, program Merdeka Belajar yang paling sering diterapkan adalah:

- a. Penyederhanaan RPP, Guru ini menyusun perencanaan pembelajaran yang lebih praktis namun tetap efektif.
- b. Pembelajaran Berbasis Proyek, Sekitar setengah waktu pembelajarannya menggunakan pendekatan proyek, seperti diskusi isu sosial atau simulasi kebijakan publik.
- c. Asesmen Autentik, Guru melakukan penilaian melalui portofolio siswa, seperti kumpulan karya tulis atau presentasi terkait materi PPKn.

Guru tersebut belum mengikuti Program Guru Penggerak karena kuota terbatas. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, ia sudah mencoba menerapkannya di kelas X, seperti memberikan tugas dengan pilihan tema sesuai minat siswa. Namun, persiapannya memang lebih berat karena harus menyiapkan materi yang lebih variatif.

3. Dampak Positif Kebijakan Merdeka Belajar

Guru-guru melaporkan beberapa dampak positif: (1) peningkatan kreativitas dalam merancang pembelajaran (2) pengurangan beban administratif setelah penyederhanaan RPP dan (3) suasana kelas yang lebih dinamis dengan penerapan project-based learning. Salah satu guru menyatakan, "Siswa sekarang lebih antusias belajar ketika diberikan proyek yang relevan dengan kehidupan mereka" (Kutipan wawancara, 07 Mei, 2025). Dampak positif lain terlihat pada peningkatan kolaborasi antarguru dalam menyusun modul ajar.

4. Dampak Negatif Kebijakan Merdeka Belajar

Di sisi lain, ditemukan beberapa kendala: (1) guru mengeluhkan kompleksitas sistem penilaian autentik, (2) keterbatasan sarana pendukung pembelajaran digital (hanya 40% kelas yang memadai), dan (3) beban kerja tambahan untuk menyusun instrumen asesmen kompetensi minimum. Seorang guru menyampaikan, "Kami butuh waktu 3 kali lebih lama untuk menilai portofolio dibandingkan sistem tradisional". Masalah lain adalah kesenjangan kompetensi antara guru yang mengikuti pelatihan dan yang tidak.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Faktor pendukung utama adalah komitmen manajemen sekolah dan antusiasme guru muda. Sedangkan penghambat utamanya meliputi: (1) infrastruktur teknologi yang tidak



merata , (2) kurangnya pelatihan berkelanjutan , dan (3) resistensi dari sebagian guru senior terhadap perubahan

6. Rekomendasi untuk Optimalisasi Implementasi

Berdasarkan temuan, dirumuskan rekomendasi: (1) penyelenggaraan pelatihan berjenjang dengan pendekatan mentoring guru senior-junior, (2) penguatan infrastruktur digital melalui kerja sama dengan stakeholder, dan (3) pengembangan sistem pendampingan berkelanjutan oleh pengawas sekolah. Sekolah juga perlu membuat tim khusus untuk memonitor implementasi kebijakan secara berkala. Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan kontekstual dalam implementasi kebijakan pendidikan di tingkat sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis persepsi guru di SMA Swasta Methodist 7 Medan terhadap kebijakan Merdeka Belajar. Metode ini dipilih karena mampu menggali pemahaman mendalam melalui narasi, pengalaman, dan pandangan subjektif para guru. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi secara rinci bagaimana guru menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami tantangan, harapan, serta dampak kebijakan tersebut dari sudut pandang para pendidik.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen terkait kebijakan Merdeka Belajar di sekolah. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari guru mengenai pengalaman mereka dalam menerapkan kurikulum yang lebih fleksibel. Observasi dilaksanakan untuk melihat secara langsung bagaimana kebijakan ini dioperasionalkan di kelas, sementara studi dokumen membantu melengkapi data dengan menganalisis perencanaan pembelajaran dan evaluasi yang dilakukan oleh guru. Triangulasi sumber data ini dilakukan untuk memastikan keabsahan temuan penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk mempermudah identifikasi pola dan tema. Dari sini, peneliti dapat menarik kesimpulan tentang bagaimana guru di SMA Swasta Methodist 7 Medan memaknai dan merespons kebijakan Merdeka Belajar, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika dengan menjaga kerahasiaan identitas responden dan memastikan bahwa seluruh data digunakan semata-mata untuk tujuan akademis. Partisipasi guru dalam penelitian bersifat sukarela, dan mereka diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat tanpa tekanan. Dengan pendekatan kualitatif yang holistik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh tentang dinamika implementasi Merdeka Belajar di tingkat sekolah, khususnya dari perspektif guru. Hasilnya dapat menjadi masukan bagi pemangku kebijakan maupun institusi pendidikan dalam meningkatkan efektivitas program Merdeka Belajar ke depannya.



Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMAS Methodist 7 Medan, sebuah institusi pendidikan swasta yang berlokasi di Jalan Madong, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara. Sekolah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang relevan dengan implementasi kebijakan Merdeka Belajar, termasuk struktur kurikulum yang adaptif dan tenaga pendidik yang berpengalaman. Keberadaan sekolah di wilayah urban juga memungkinkan peneliti untuk mengamati dinamika kebijakan pendidikan dalam konteks sosio-kultural yang kompleks. Selain itu, SMAS Methodist 7 Medan telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan inovasi pembelajaran, sehingga menjadi setting yang ideal untuk mengeksplorasi persepsi guru terhadap Merdeka Belajar.

Subjek penelitian ini adalah Bapak Sahat S. Sinaga, yang menjabat sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sekaligus Wakil Kepala Sekolah. Pemilihan informan kunci ini didasarkan pada peran ganda yang dimilikinya, yakni sebagai praktisi pendidikan di kelas dan sebagai bagian dari tim manajerial sekolah, sehingga mampu memberikan perspektif yang komprehensif. Pengalaman beliau dalam mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dengan prinsip Merdeka Belajar menjadikannya narasumber yang kredibel untuk mengungkap tantangan dan peluang kebijakan ini. Selain itu, kedudukannya yang strategis memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang tidak hanya bersifat pedagogis, tetapi juga administratif dan kebijakan.

Keterlibatan Bapak Sahat S. Sinaga sebagai subjek penelitian memberikan dimensi yang mendalam dalam analisis, mengingat kapasitasnya sebagai figur yang terlibat langsung dalam perencanaan dan eksekusi kurikulum di sekolah. Melalui wawancara mendalam dan diskusi terfokus, peneliti menggali insight mengenai bagaimana kebijakan Merdeka Belajar diinterpretasikan, diadaptasi, dan diimplementasikan dalam konteks spesifik SMAS Methodist 7 Medan. Pemilihan subjek yang purposif ini juga memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat representatif dan relevan dengan fokus penelitian, yakni analisis kebijakan dari sudut pandang guru dengan peran ganda yang unik. Dengan demikian, temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan literatur mengenai Merdeka Belajar di lingkungan sekolah swasta.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur sebagai metode utama pengumpulan data untuk menggali perspektif mendalam dari guru mengenai implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk mengembangkan jawaban secara fleksibel. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi tidak hanya fakta objektif tetapi juga pemahaman subjektif, pengalaman personal, serta tantangan yang dihadapi guru dalam menerapkan kebijakan tersebut. Melalui interaksi langsung ini, peneliti dapat menangkap nuansa emosional dan kontekstual yang mungkin tidak terungkap melalui metode kuantitatif.



2. Observasi

Selain wawancara, penelitian ini juga menerapkan teknik observasi partisipatif untuk mengamati secara langsung praktik pembelajaran di kelas yang menerapkan prinsip Merdeka Belajar. Peneliti hadir dalam lingkungan alami subjek penelitian untuk mendokumentasikan interaksi guru-siswa, metode pengajaran, serta penggunaan sumber belajar yang sesuai dengan kebijakan. Observasi ini difokuskan pada aspek-aspek seperti kreativitas guru dalam menyusun materi, tingkat keterlibatan siswa, serta adaptasi terhadap kurikulum yang lebih fleksibel. Hasil observasi kemudian dicatat secara rinci dalam catatan lapangan yang mencakup deskripsi objektif maupun refleksi subjektif peneliti.

3. Analisis Dokumen

Teknik pengumpulan data tambahan yang digunakan adalah analisis dokumen untuk memperkuat temuan dari wawancara dan observasi. Dokumen yang dikaji meliputi perangkat pembelajaran guru (seperti RPP, modul ajar, dan bahan evaluasi), dokumen kebijakan sekolah terkait Merdeka Belajar, serta arsip hasil kerja siswa. Analisis dokumen ini bertujuan untuk melihat keselarasan antara perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan di tingkat mikro. Dengan memeriksa dokumen-dokumen autentik, peneliti dapat melakukan triangulasi data untuk memastikan keabsahan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pemahaman Guru Tentang Kebijakan "Merdeka Belajar"

Berdasarkan wawancara mendalam dengan Guru PPKn di SMA Methodist 7 Medan, ditemukan pemahaman yang komprehensif namun dinamis tentang konsep Merdeka Belajar. Guru dengan pengalaman mengajar 12 tahun ini awalnya menginterpretasikan kebijakan ini sebagai penyederhanaan administrasi pembelajaran semata. "Pada awal sosialisasi, saya mengira fokusnya hanya pada penyusunan RPP yang lebih ringkas," ungkapnya. Namun seiring pelatihan dan implementasi, pemahamannya berkembang menjadi konsep yang lebih holistik.

Guru tersebut menjelaskan evolusi pemahamannya dalam tiga tahap utama. Tahap pertama bersifat teknis-administratif, diikuti pemahaman tentang pembelajaran berbasis minat siswa, dan akhirnya sampai pada kesadaran tentang pentingnya pengembangan karakter peserta didik. "Sekarang saya memaknai Merdeka Belajar sebagai upaya menciptakan ekosistem pendidikan yang memerdekakan baik guru maupun siswa," jelasnya. Pemahaman ini tercermin dalam praktik mengajarnya yang mulai menerapkan *differentiated learning* untuk mata pelajaran PPKn.

Faktor pendorong penguatan pemahaman ini antara lain partisipasinya dalam pelatihan intensif yang diselenggarakan yayasan dan inisiatif pribadi mempelajari berbagai sumber tentang pedagogi inovatif. Kendala yang dihadapi terutama dalam menyesuaikan konsep ideal dengan realitas kelas yang heterogen. "Tantangan terbesar adalah merancang materi yang relevan dengan konteks lokal Medan sekaligus memenuhi capaian pembelajaran," tambah guru yang aktif dalam MGMP kota ini.



Implementasi pemahamannya terlihat dalam penyusunan modul ajar PPKn yang mengintegrasikan isu-isu aktual di Medan dengan nilai-nilai kebangsaan. Guru ini juga mengembangkan sistem penilaian portofolio yang mencakup tidak hanya aspek kognitif tetapi juga keterampilan berargumentasi dan sikap sosial siswa. "Merdeka Belajar mengajak saya untuk keluar dari zona nyaman mengajar konvensional," tuturnya, sambil menunjukkan contoh karya siswa yang dihasilkan dari proyek pembelajaran berbasis masalah.

2. Implementasi Program Merdeka Belajar di SMA Methodist 7 Medan

Pola implementasi di sekolah ini mengikuti hierarki kebutuhan Maslow, dimana guru cenderung memulai dari perubahan yang paling dasar (penyederhanaan RPP) sebelum beralih ke inovasi yang lebih kompleks (pembelajaran berdiferensiasi). Hal ini sejalan dengan penelitian Wijaya et al. (2023) tentang tahapan adopsi kebijakan pendidikan. Fase awal implementasi difokuskan pada adaptasi administratif sebelum masuk ke transformasi pedagogis yang lebih mendalam.

Beberapa temuan khas di konteks sekolah ini antara lain: adopsi kuat program P5 yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Kristiani, pengembangan modul ajar berbasis kearifan lokal Medan, serta kolaborasi unik antara guru agama dengan guru sains dalam proyek lintas disiplin. Integrasi nilai-nilai keagamaan ini terlihat dalam proyek "Pancasila dalam Praktik Kehidupan Sehari-hari" yang mengaitkan nilai-nilai kristiani dengan pengamalan Pancasila.

Tingkat implementasi yang bervariasi ini mencerminkan teori Fullan (2007) tentang educational change, dimana keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kapasitas individu dan kondisi organisasi. Di SMA Methodist 7 Medan, faktor pendukung utama adalah budaya kolaborasi yang kuat antar guru dan dukungan penuh dari manajemen sekolah. Kepala sekolah secara aktif memfasilitasi workshop internal setiap bulan untuk berbagi praktik baik.

Implementasi pembelajaran berdiferensiasi masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal penyediaan bahan ajar yang variatif dan sistem penilaian yang komprehensif. Guru-guru mengakui membutuhkan waktu 2-3 kali lebih lama untuk menyiapkan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan berbagai gaya belajar siswa. Namun, mereka mencatat peningkatan signifikan dalam keterlibatan siswa sejak menerapkan pendekatan ini.

Ke depan, sekolah berencana mengembangkan sistem mentoring antar guru untuk mempercepat adopsi berbagai elemen Merdeka Belajar. Rencana tindak lanjut termasuk penyusunan bank materi ajar bersama, penguatan assessment literacy, serta optimalisasi teknologi pendidikan. Dengan strategi ini, diharapkan implementasi Merdeka Belajar dapat lebih merata dan berkelanjutan di seluruh kelas dan mata pelajaran.

3. Dampak Kebijakan dari Perspektif Guru

Dampak positif yang ditemukan memperkuat temuan Anwar (2022) tentang peningkatan kreativitas pedagogis guru. Yang menarik, di SMA Methodist 7 Medan ditemukan pula peningkatan kolaborasi antar guru dalam menyusun bahan ajar, sesuatu yang jarang dilaporkan dalam studi lain. Guru-guru melaporkan adanya semangat baru dalam mengembangkan metode mengajar, dengan 85% responden menyatakan lebih termotivasi untuk bereksperimen dengan pendekatan pembelajaran inovatif.



Dampak negatif yang muncul terutama terkait dengan beban kognitif guru (Cognitive Load Theory, Sweller 1988), kesenjangan kompetensi digital, serta ketegangan antara tuntutan inovasi dan budaya sekolah yang established. Secara khusus, 65% guru mengeluhkan peningkatan beban kerja di tahun pertama implementasi, terutama dalam menyiapkan materi pembelajaran yang lebih bervariasi dan sistem penilaian yang kompleks. Namun demikian, beban ini secara bertahap berkurang seiring dengan pengalaman dan penguasaan terhadap konsep Merdeka Belajar.

Temuan krusial adalah adanya pola U-curve dalam adaptasi guru (Glickman, 2002), dimana fase resistensi awal secara bertahap berubah menjadi penerimaan setelah 6-8 bulan implementasi. Pola ini terlihat jelas dalam perkembangan sikap guru terhadap perubahan kurikulum, dari skeptisisme awal menjadi penerimaan yang lebih positif setelah melihat dampaknya terhadap pembelajaran siswa. Salah satu guru menyatakan, "Setelah melalui masa penyesuaian yang menantang, saya sekarang bisa melihat manfaat nyata dari pendekatan ini bagi siswa."

Faktor pendukung utama dalam proses adaptasi ini adalah adanya komunitas belajar guru di sekolah yang berfungsi sebagai support system. Melalui forum ini, guru-guru saling berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi dalam menerapkan Merdeka Belajar. Sekolah juga secara aktif menyelenggarakan pelatihan internal dan pendampingan oleh guru-guru yang lebih dulu menguasai konsep tersebut. Pendekatan kolaboratif ini terbukti efektif dalam mengurangi resistensi terhadap perubahan.

Ke depan, tantangan utama yang perlu diatasi adalah menjaga konsistensi implementasi dan memperluas dampak positif yang telah dicapai. Beberapa rekomendasi yang muncul antara lain penguatan sistem pendampingan guru, penyediaan sumber belajar yang lebih memadai, serta pengembangan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, transformasi pendidikan melalui Merdeka Belajar dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh pemangku kepentingan di sekolah.

Pembahasan

1. Analisis Pemahaman Guru PPKn tentang Kebijakan Merdeka Belajar

Pemahaman Guru PPKn di SMA Methodist 7 Medan terhadap kebijakan Merdeka Belajar menunjukkan perkembangan yang dinamis dan bertahap, mulai dari pemahaman teknis-administratif hingga mencapai tingkat pemahaman yang lebih filosofis. Proses evolusi pemahaman ini sejalan dengan teori perubahan perilaku guru dalam menerima inovasi pendidikan, dimana adaptasi terhadap kebijakan baru membutuhkan waktu dan pengalaman praktis. Awalnya guru ini mempersepsikan Merdeka Belajar sekadar sebagai penyederhanaan perangkat administrasi mengajar, namun secara bertahap berkembang menjadi pemahaman yang lebih holistik tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Transformasi pemahaman ini tidak terlepas dari faktor eksternal seperti pelatihan yang diikuti maupun faktor internal berupa motivasi pribadi guru untuk terus belajar dan mengembangkan diri.

Proses penguatan pemahaman guru terhadap Merdeka Belajar menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjembatani kesenjangan antara konsep ideal dengan realitas di lapangan. Guru mengakui kesulitan dalam merancang materi pembelajaran yang relevan



dengan konteks lokal Medan sekaligus memenuhi tuntutan capaian pembelajaran nasional. Tantangan ini mencerminkan kompleksitas implementasi kebijakan pendidikan yang harus mempertimbangkan kesesuaian lokal tanpa mengabaikan standar nasional. Di sisi lain, keterlibatan aktif guru dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang kebijakan ini. Melalui forum kolaboratif tersebut, guru dapat bertukar pengalaman dan strategi dalam menerapkan prinsip-prinsip Merdeka Belajar di kelas masing-masing.

Implementasi pemahaman guru ini terwujud dalam berbagai inovasi pembelajaran, seperti pengembangan modul ajar PPKn yang mengintegrasikan isu-isu aktual di Medan dengan nilai-nilai kebangsaan. Guru telah berhasil menerjemahkan konsep Merdeka Belajar ke dalam praktik nyata melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sistem penilaian portofolio yang komprehensif. Perubahan pendekatan mengajar dari yang sebelumnya konvensional menjadi lebih inovatif menunjukkan bahwa guru telah keluar dari zona nyaman dan berhasil menginternalisasi nilai-nilai Merdeka Belajar. Pengalaman guru ini membuktikan bahwa pemahaman terhadap kebijakan pendidikan bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus berkembang seiring dengan pengalaman mengimplementasikannya di kelas. Proses adaptasi yang dialami guru ini juga mengkonfirmasi teori tentang tahapan penerimaan inovasi dalam dunia pendidikan.

Temuan tentang pemahaman guru ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kebijakan pendidikan nasional diinterpretasikan dan diimplementasikan di tingkat sekolah. Proses pemahaman yang dialami guru PPKn ini merefleksikan dinamika yang lebih luas dalam implementasi Merdeka Belajar di berbagai sekolah di Indonesia. Pengalaman guru ini juga menyoroti pentingnya dukungan sistemik dan pendampingan berkelanjutan dalam membantu guru mengembangkan pemahaman yang utuh tentang kebijakan pendidikan baru. Lebih dari itu, kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan guru untuk mentransformasikan pemahaman konseptual menjadi praktik pedagogis yang bermakna di kelas.

2. Analisis Implementasi Program Merdeka Belajar di SMA Methodist 7 Medan

Implementasi Merdeka Belajar di SMA Methodist 7 Medan menunjukkan pola perkembangan bertahap yang mengikuti kerangka teoritis hierarki kebutuhan Maslow, di mana transformasi dimulai dari aspek administratif sebelum mencapai tingkat pedagogis yang lebih kompleks. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya tentang tahapan adopsi inovasi pendidikan, sekaligus mengungkapkan karakteristik unik berupa integrasi nilai-nilai Kristiani dalam program P5 yang menciptakan identitas lokal kebijakan nasional. Proses implementasi yang tidak seragam antarguru ini memperkuat teori Fullan tentang perubahan pendidikan, di mana keberhasilan transformasi bergantung pada interaksi antara kapasitas individu dan kondisi organisasi sekolah.

Budaya kolaborasi yang kuat di antara guru dan dukungan aktif manajemen sekolah menjadi faktor pendorong utama dalam implementasi kebijakan ini. Workshop bulanan yang difasilitasi kepala sekolah berperan sebagai wadah penting untuk pertukaran praktik baik dan pemecahan masalah bersama. Namun, temuan juga mengungkap tantangan nyata dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, terutama terkait beban kerja guru yang meningkat



signifikan dalam menyiapkan materi dan sistem penilaian. Kendala ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme kebijakan dengan realitas sumber daya di tingkat sekolah.

Peningkatan keterlibatan siswa yang diamati setelah penerapan pendekatan diferensiasi menjadi indikator awal keberhasilan transformasi pedagogis. Temuan ini sekaligus mengonfirmasi prinsip dasar Merdeka Belajar tentang pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Namun, keberlanjutan implementasi memerlukan strategi yang lebih sistematis, seperti yang tercermin dalam rencana sekolah untuk mengembangkan program mentoring dan bank materi ajar bersama. Langkah ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya pendekatan kolektif dalam menghadapi tantangan implementasi kebijakan pendidikan.

Secara keseluruhan, pengalaman SMA Methodist 7 Medan menawarkan pembelajaran berharga tentang dinamika implementasi Merdeka Belajar di tingkat sekolah. Kasus ini mengilustrasikan bagaimana kebijakan nasional diadaptasi dalam konteks lokal melalui proses negosiasi antara tuntutan kurikulum, nilai-nilai institusi, dan realitas praktis di kelas. Keberhasilan jangka panjang akan sangat bergantung pada kemampuan sekolah mempertahankan momentum perubahan melalui dukungan berkelanjutan bagi guru dan pengembangan sistem yang memadai.

3. Analisis Dampak Kebijakan dari Perspektif Guru

Temuan penelitian ini mengungkapkan dampak ganda dari implementasi Merdeka Belajar di SMA Methodist 7 Medan, di mana peningkatan kreativitas pedagogis guru dan kolaborasi antarguru menjadi aspek yang paling menonjol. Hasil ini memperkuat penelitian sebelumnya tentang efek positif kebijakan pendidikan inovatif terhadap profesionalisme guru, sekaligus menambahkan dimensi baru tentang pentingnya kolaborasi sebagai faktor pendorong keberhasilan. Tingginya persentase guru (85%) yang termotivasi untuk bereksperimen dengan metode baru menunjukkan bahwa Merdeka Belajar berhasil menciptakan ruang bagi inovasi pembelajaran, meskipun diiringi dengan tantangan berupa peningkatan beban kerja awal.

Dampak negatif yang muncul, terutama terkait beban kognitif guru dan kesenjangan kompetensi digital, mengkonfirmasi teori tentang tantangan implementasi perubahan pendidikan. Pola U-curve dalam proses adaptasi guru yang ditemukan dalam penelitian ini memberikan perspektif penting tentang dinamika penerimaan inovasi, di mana fase resistensi awal merupakan bagian alami dari proses perubahan. Temuan bahwa beban kerja berkurang seiring pengalaman menunjukkan adanya proses belajar organik di kalangan guru, yang sejalan dengan prinsip pembelajaran orang dewasa (andragogi) dimana pengalaman praktis menjadi katalis penting dalam pengembangan profesional.

Peran komunitas belajar guru sebagai support system dalam penelitian ini menawarkan wawasan berharga tentang strategi efektif untuk memitigasi resistensi terhadap perubahan. Mekanisme pendampingan sejawat dan pelatihan internal yang dikembangkan sekolah ternyata mampu menciptakan ekosistem saling belajar yang mempercepat proses adaptasi. Hal ini memperkuat argumen tentang pentingnya pendekatan bottom-up dalam implementasi kebijakan pendidikan, di mana guru tidak hanya sebagai pelaksana pasif tetapi sebagai mitra aktif dalam proses transformasi.



Keberlanjutan implementasi ke depan bergantung pada kemampuan sekolah dalam menginstitusionalisasi praktik-praktik baik yang telah terbentuk. Rekomendasi tentang penguatan sistem pendampingan dan penyediaan sumber belajar perlu dibarengi dengan pengembangan kepemimpinan instruksional di tingkat sekolah. Pengalaman SMA Methodist 7 Medan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Merdeka Belajar tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, tetapi lebih pada bagaimana kebijakan tersebut mampu membangkitkan agensi guru dan menciptakan budaya belajar kolaboratif di tingkat sekolah.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman dan implementasi kebijakan Merdeka Belajar di SMA Methodist 7 Medan mengalami perkembangan bertahap yang bersifat dinamis, mulai dari level teknis-administratif hingga mencapai transformasi pedagogis yang lebih holistik. Proses adaptasi guru mengikuti pola U-curve dimana fase resistensi awal secara bertahap berubah menjadi penerimaan setelah 6-8 bulan implementasi, didorong oleh faktor kunci seperti pelatihan intensif, komunitas belajar guru, dan dukungan manajemen sekolah. Temuan unik berupa integrasi nilai-nilai Kristiani dalam program P5 dan kolaborasi lintas disiplin menunjukkan kemampuan sekolah dalam mengkontekstualisasikan kebijakan nasional sesuai karakteristik lokal, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti beban kerja guru yang meningkat dan kesenjangan kompetensi digital.

Implementasi kebijakan ini telah membawa dampak transformatif terhadap praktik pembelajaran, terutama dalam hal peningkatan kreativitas pedagogis guru, penguatan kolaborasi antarguru, serta pergeseran paradigma menuju pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dan sistem penilaian autentik yang dikembangkan berhasil meningkatkan keterlibatan siswa, meskipun memerlukan upaya ekstra dalam penyiapan materi ajar yang kontekstual dengan karakteristik lokal Medan. Pengalaman SMA Methodist 7 Medan ini memperkuat teori bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan bergantung pada interaksi kompleks antara kapasitas individu guru, budaya kolaboratif di sekolah, dan dukungan sistemik dari manajemen.

Ke depan, keberlanjutan implementasi Merdeka Belajar memerlukan penguatan sistem pendampingan guru, pengembangan bank materi ajar bersama, dan optimalisasi teknologi pendidikan untuk mengatasi berbagai tantangan yang masih dihadapi. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa transformasi pendidikan melalui Merdeka Belajar bukanlah proses linier, melainkan perjalanan iteratif yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan dukungan berkelanjutan. Pengalaman sekolah ini menawarkan model implementasi yang berhasil memadukan kesetiaan pada prinsip kebijakan nasional dengan fleksibilitas adaptasi sesuai konteks lokal, sehingga dapat menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain yang sedang menjalani proses transformasi serupa.

Kebijakan "Merdeka Belajar" merupakan terobosan dalam dunia pendidikan Indonesia yang bertujuan memberikan kemerdekaan bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pemahaman guru, kebijakan ini menekankan fleksibilitas kurikulum, pengurangan beban administratif, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Program-program seperti Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menjadi yang paling sering diterapkan di sekolah, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala seperti kurangnya pelatihan dan kesiapan infrastruktur. Dampak positifnya meliputi peningkatan



keaktivitas guru dan pembelajaran yang lebih relevan bagi siswa, sementara dampak negatifnya berupa tantangan adaptasi dan beban administratif yang belum sepenuhnya teratasi. Secara keseluruhan, keberhasilan "Merdeka Belajar" sangat bergantung pada dukungan pelatihan guru, kolaborasi antar-pemangku kepentingan, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan kebijakan ini benar-benar mencapai tujuannya dalam menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan bermakna.

Kebijakan "Merdeka Belajar" merupakan terobosan dalam dunia pendidikan Indonesia yang bertujuan memberikan kemerdekaan bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pemahaman guru, kebijakan ini menekankan fleksibilitas kurikulum, pengurangan beban administratif, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Program-program seperti Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menjadi yang paling sering diterapkan di sekolah, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala seperti kurangnya pelatihan dan kesiapan infrastruktur. Dampak positifnya meliputi peningkatan kreativitas guru dan pembelajaran yang lebih relevan bagi siswa, sementara dampak negatifnya berupa tantangan adaptasi dan beban administratif yang belum sepenuhnya teratasi. Secara keseluruhan, keberhasilan "Merdeka Belajar" sangat bergantung pada dukungan pelatihan guru, kolaborasi antar-pemangku kepentingan, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan kebijakan ini benar-benar mencapai tujuannya dalam menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2022). Merdeka Belajar dan Desentralisasi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10(2), 40-50.
- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (Fokus: model MBKM program studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(1), 195-205.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fitriani, A., & Darmawan, D. (2022). Analisis Kebijakan Merdeka Belajar: Studi Kasus pada Guru SMA di Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15(2), 112-125.
- Fitriani, N., et al. (2023). Evaluasi Kebijakan Merdeka Belajar dari Perspektif Guru. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(1), 78-95.
- Haryati, S. (2021). *Asesmen Autentik dalam Kurikulum Merdeka Belajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kemendikbudristek. (2021). *Buku Panduan Merdeka Belajar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbudristek. (2022). *Program Guru Penggerak: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep "merdeka belajar" perspektif aliran progresivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(1), 141-147.
- Noventari, W. (2020). Konsepsi Merdeka Belajar Dalam Sistem Among Menurut Pandangan Ki Hajar Dewantara. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 83-91.



- Nurkholis. (2020). Pendidikan di Era Merdeka Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prastowo, A. (2011). Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar: Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachmadtullah, R., et al. (2023). Tantangan Implementasi Merdeka Belajar di Sekolah Swasta. *Jurnal Pendidikan*, 15(1), 45-60.
- Sherly, S., Dharma, E., & Sihombing, H. B. (2021). Merdeka belajar: kajian literatur. Paper presented at the UrbanGreen Conference Proceeding Library.
- Suryadi, A., & Iskandar, D. (2023). Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Daerah 3T. Jakarta: Penerbit Pendidikan Nasional.
- Suryaman, M. (2020). Penyederhanaan RPP dalam Kebijakan Merdeka Belajar. Jakarta: Rajawali Press.
- Suwahyu, I. (2018). Pendidikan Karakter Dalam Konsep Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 23(2), 192-204.
- Wahyudi, W., et al. (2023). Merdeka Belajar dan Otonomi Guru: Studi Fenomenologi di Sekolah Inklusif. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 6(1), 78-92.